



IMPLEMENTASI PROGRAM KLAMPID NEW GENERATION DALAM MENINGKATKAN KAWASAN SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

Naufal Alfarisi¹, Arif Darmawan², Endang Indarturti³

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2024

Revised Januari 2024

Accepted Januari 2024

Available online Januari 2024

Email

naufalalfarisi50@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini didapat dari proses wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan, sedangkan untuk teknik analisisnya dilakukan melalui proses pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1)Komunikasi, Pemerintah Kecamatan Semampir telah dengan baik menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kelurahan atau dengan internal Pemerintah Kecamatan Semampir. Di internal Kecamatan, para staff rutin memberikan laporan kepada atasan terkait dengan progress pelayanan dan juga keluhan dari masyarakat agar dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, Pemerintah Kecamatan Semampir juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar program Klampid *New Generation* dapat berjalan sesuai dengan tujuan. (2)Sumber daya,

Pemerintah Kecamatan Semampir memiliki sumber daya yang cukup mendukung. Secara sumber daya manusia, Pemerintah Kecamatan Semampir telah memiliki sumber daya aparatur yang kompeten dan mampu menjadi pendamping masyarakat mengatasi masalah yang mereka hadapi. Untuk sarana prasarana, Pemerintah Kecamatan Semampir memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Semampir. (3)Disposisi, Pemerintah kecamatan Semampir memalui aparatur birokrasinya sangat mendukung suksesi Implementasi program Klampid *New Generation*. Mereka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standart operational prosedur pelayanan yang sudah dibuat sebelumnya dengan tindakan nyata dilapangan. (4)Struktur birokrasi, Aparatur birokrasi dari Pemerintah Kecamatan Semampir telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat dalam jabatan yang mereka sandang sekarang serta pelaksanaan pelayanan berbasis online dengan aplikasi Klampid *New Generation* juga sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Adapun untuk



faktor pendukung dan penghambat, untuk faktor pendukung adalah Sikap pegawai yang baik dan tanggap dalam melayani masyarakat, adanya koordinasi secara vertikal maupun horisontal yang baik setiap lini, dan dari segi sarana prasarana dan pegawai pemerintah di Kecamatan Semampir. Adapun untuk faktor penghambatnya yakni Tidak semua masyarakat di wilayah Kecamatan Semampir memiliki sarana prasarana untuk mengakses menu pada program Klampid *New Generation*.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Inovasi Pelayanan Publik, EGovernment, Administrasi Kependudukan

A. PENDAHULUAN

Masyarakat tentu menginginkan pelayanan yang baik transparan dan responsif. Maka dari itu, pemerintah yang menjadi pelayan masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan reformasi birokrasi untuk menghilangkan birokrasi yang tidak kompeten di lingkungan pemerintahan. Tentu saja, setelah hampir beberapa tahun melakukan reformasi birokrasi, tatanan pemerintahan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Salah satu indikator berhasil tidaknya pelaksanaan reformasi birokrasi ini adalah bagaimana cara memuaskan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara.

Pada dasarnya kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama reformasi birokrasi. Sebab reformasi birokrasi merupakan suatu konsep yang mengambil langkah nyata untuk memangkas birokrasi sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui keadilan sosial. Rakyatlah yang mempunyai hak paling besar terhadap pemerintah dan terhadap segala macam produk yang dihasilkan. Karena masyarakat harus berhak atas segala macam pelayanan di negaranya, terutama yang bersumber dari pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, maka perhatian terhadap kepuasan masyarakat merupakan hal yang perlu agar masyarakat dapat memperoleh haknya.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terus menimbulkan banyak keluhan dan ketidakpuasan. Banyak konsep lain yang diusung dan diterapkan dalam penerapan praktik *good governance*, kebijakan berbasis manajemen sektor publik, dan implementasi reformasi birokrasi belum menunjukkan kepuasan publik. Namun kita juga perlu fokus pada penyediaan layanan yang baik dan berkualitas tinggi serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Ini bukan hanya soal kepuasan atau ketidakpuasan, ini adalah layanan yang memiliki dampak positif jangka panjang bagi masyarakat sebagai pemegang hak-hak sipil. Sejak diperkenalkannya pemerintahan berbasis digital di Indonesia, pemerintah pada dasarnya mulai mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi digital. Di



sektor pemerintahan, penyediaan pelayanan yang baik merupakan salah satu hal yang harus dilakukan sebagai bagian dari reformasi, dan pemerintah harus menyadari perlunya pelayanan yang mudah diakses, efisien, efektif dan efektif bagi masyarakat.

Di Indonesia, pelayanan publik yang dilakukan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah merupakan bagian dari pelayanan publik. Setiap pemangku kebijakan di level kabupaten/kota wajib melakukan kebijakan nasional pengendalian penduduk yang sudah diundangkan melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 6 Tahun 2014, Nomor 5, sehubungan dengan amandemen UU Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006. Tujuan dari UU ini adalah guna meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan menanggulangi permasalahan terkait data kependudukan. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Kebijakan Pelayanan Publik dalam rangka Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang terdapat dalam Perda Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Wilayah Kota Surabaya.

Kebijakan pengelolaan administrasi kependudukan menghendaki agar proses penyelenggaraan pelayanan pengelolaan kependudukan bisa dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik, yaitu segera, akurat dan tepat. Pengelolaan kependudukan sangatlah penting karena senantiasa terlibat dalam seluruh aktivitas kehidupan di Indonesia. Kecamatan berfungsi sebagai kepala struktur pemerintahan di bawah pemerintahan kabupaten atau kota yang berhubungan langsung dengan penduduk perkotaan dan pedesaan.

Banyaknya masyarakat yang belum paham akan pentingnya pemutakhiran data kependudukan. Beberapa dari masyarakat sering mengabaikan perubahan data kependudukan, sehingga berdampak pada data yang tersedia di pusat. Data yang tidak diperbarui dengan cepat dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbarui data ini karena data ini digunakan untuk merumuskan banyak kebijakan pembangunan dan kesetaraan di kawasan. Sehubungan dengan program Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (KALIMASADA) yang dirilis Dispendukcapil Surabaya, pelayanan publik semakin ditingkatkan melalui aplikasi KNG di seluruh kecamatan Kota Surabaya khususnya Kecamatan Semampir. Klampid *New Generation* yakni salah satu bentuk implementasi *e-Government* dalam hal pembaharuan aplikasi lama guna mengoptimalkan pelayanan pengelolaan kependudukan yang ada di Kota Surabaya. Aplikasi tersebut mencakup macam-macam permohonan pengurusan kependudukan, mulai dari permohonan pengurusan akta kematian dan kelahiran, pelayanan perpindahan, perubahan data KK, hingga E-KTP dan pencetakan ulang permohonan KK dan KIA. Aplikasi KNG memanfaatkan Internet untuk mempermudah layanan pengelolaan kependudukan untuk setiap warga Surabaya. Diharapkan aplikasi KNG ini mudah diterapkan dan di gunakan masyarakat umum karena dapat menghemat tenaga, biaya



dan waktu dalam mengurus administrasi kependudukan. Aplikasi Klampid *New Generation* merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap dokumen kependudukan. Implementasi aplikasi KNG yang dikelola oleh Disdukcapil Kota Surabaya ini merupakan layanan kependudukan yang memudahkan warga dalam memenuhi kebutuhannya tanpa harus pergi ke kecamatan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

George Edward III menekankan bahwa permasalahan utama dalam administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (Tachjan, 2016). Pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif jika memperhatikan empat aspek kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi melibatkan cara penyampaian kebijakan kepada organisasi dan masyarakat serta respons yang diterima. Sumber daya mencakup ketersediaan dukungan, terutama sumber daya manusia, yang mempengaruhi kemampuan pelaksana kebijakan publik. Disposisi melibatkan kesiapan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi mencakup kesesuaian struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Pemahaman dan penerapan empat aspek ini secara holistik akan memperkuat pelaksanaan kebijakan dengan lebih efektif dan efisien.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di Kabupaten Berau. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan proses implementasi program Klampid *New Generation* dalam upaya meningkatkan kawasan sadar administrasi kependudukan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan mengidentifikasi apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan program tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dan menggunakan teknik analisa data berdasar pandangan Milles, Huberman, & Saldaña (2014) dalam (Sahir, 2022).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini merupakan penjelasan singkat dari data dan informasi yang telah peneliti kumpulkan dan analisa sebelumnya. Menurut Edward III, kebijakan Implementasi Program Klampid *New Generation* di Kecamatan Semampir Kota Surabaya dipengaruhi oleh;



Komunikasi

Dari hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam pengimplementasian aplikasi Klampid *New Generation* sudah terjalin dengan baik, mulai dari komunikasi personal maupun dengan sosialisasi. Selain itu kerja sama dan koordinasi antara pegawai Kecamatan dan kelurahan patut diacungi jempol. Meskipun demikian, perlu ditingkatkan persoalan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya warga yang masih gaptek tentang handphone. Hal ini diperlukan karena tidak semua masyarakat memiliki HP, dan belum seluruh masyarakat yang memiliki HP peduli dengan inovasi aplikasi KNG ini. Dalam hal ini alangkah baiknya dilakukan penyuluhan secara door to door, agar seluruh masyarakat tidak tertinggal soal administrasi kependudukan. Selain itu pemerintah kecamatan harus optimal memberdayakan RT/RW yang ada dengan melimpahkan sebagian wewenang dalam bentuk pengurusan adminduk cukup sampai RT/RW sebagai bentuk kepanjangan tangan dari pemerintah dan memudahkan untuk berkomunikasi serta mensosialisasikan kepada warga.

Sumber Daya

Dari hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia yang dilibatkan dalam pengimplementasian Inovasi Aplikais Klampid *New Generation* hanya ada satu per kelurahan. Ini merupakan jatah yang diambilkan ASN dari Dispendukcapil, bukan pegawai kelurahan. Oleh karena itu di Kecamatan Semampir menunjuk satu lagi staff untuk membantu mengoperasikan aplikasi KNG di kantor kecamatan. Diharapkan dengan bertambahnya admin di kecamatan dapat mempercepat dan mempermudah dalam melakukan pengurusan administrasi. Hal ini sudah sesuai dengan variabel teori Sumber daya yaitu salah satunya adalah Staff. Sumber daya manusia memang sangatlah dibutuhkan dalam implementasi inovasi program ini, namun sumber daya informasi juga tidak kalah penting untuk diadakan. Dalam implementasi aplikasi KNG ini sumber daya informasi yaitu dari akun sosial media milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya seperti website, instagram, facebook, twitter dll. Selain itu, sumber daya informasi di Kecamatan Semampir adalah staff dan para aparatur Kelurahan yang ada di Kecamatan Semampir. Seperti yang telah disampaikan diatas, masyarakat mendapat sumber informasi melalui para staf kecamatan, staf kelurahan. Perangkat RT/RW serta media sosial. Selain beberapa indikator sumber daya diatas, masih ada sumber daya yang sangat krusial apabila sumber daya yang satu ini tidak tersedia. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya fasilitas atau sarana dan prasarana. Dengan adanya fasilitas sarpras, implementasi program akan berjalan dengan lancar. Namun sayangnya dalam implementasi program inovasi Aplikasi Klampid *New Generation* fasilitas penunjang seperti sarpras belum ada anggaran khusus untuk implementasi aplikasi KNG.



Implementasi Kebijakan Klampid *New Generation* di Kecamatan menurut pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana yang besar atau khusus. Karena dalam pelaksanaannya hanya perlu mengunduh aplikasi Klampid *New Generation* melalui playstore dengan gratis. Selain itu dalam pengurusan berkas/dokumen di Kecamatan juga memang sudah menjadi tugas pokok pegawai kecamatan sebagai penyedia pelayanan publik. Justru dengan adanya aplikasi KNG banyak staff kecamatan yang merasa terbantu karena pengurusan dokumendokumen sudah terpusat dalam satu aplikasi. Namun dalam hal ini seharusnya menjadi perhatian yang lebih oleh pemerintah. Ini disebabkan dalam pengurusan dokumen, petugas juga terkadang mengeluarkan tenaga dan biaya diluar jam kerja, Selain itu, perlunya pemerintah Kecamatan Semampir memberikan koneksi interner serta computer di lingkup RT/RW karena masih adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan susah nya akses internet dan masyarakat yang gaptek.

Disposisi

Dalam implementasi kebijakan, pelaksana harus memposisikan dirinya untuk melaksanakan kebijakan program dengan dorongan dan kemauan dari diri sendiri. Termasuk dalam Implementasi Kebijakan Aplikasi Klampid *New Generation* di Kecamatan Semampir juga mengharuskan seluruh staff Kecamatan Semampir untuk bisa menempatkan diri dalam pekerjaan yang seharusnya, demi 128 terlaksananya suatu implementasi kebijakan. Implementasi aplikasi KNG di Kecamatan Semampir juga menerapkan disposisi dengan selalu memberi dukungan berupa rapat dan briefing dari pemangku kebijakan. Dalam konteks ini, yang dimaksud pemangku kebijakan adalah kecamatan itu sendiri, atau lebih spesifiknya camat serta kepala seksi masing-masing. Selain dari pemangku kebijakan tingkat Kecamatan hingga ke Kelurahan, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga selalu melakukan pengawasan secara berkala terkait implementasi aplikasi Klampid *New Generation* ini.

Dari hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga selalu mengawasi melalui sistem terpusat di tingkat kota. Sehingga jika dalam pengurusan dokumen ada yang kurang sesuai dengan SOP yang ada, maka akan langsung menegur untuk segera diubah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai pelaksana kebijakan harus tegas dalam melaksanakan SOP yang disepakati. Pernyataan tersebut juga termasuk merupakan contoh penerapan disposisi dalam melakukan implementasi kebijakan. Selain itu perekrutan pegawai oleh Dispenduk juga sudah sesuai dengan kapabilitas yang diperlukan dan juga mumpuni dalam pekerjaannya.

Struktur Birokrasi

Implementasi aplikasi Klampid *New Generation* di Kecamatan Semampir merupakan termasuk pelaksanaan struktur birokrasi dalam pemerintahan. Sebab ketetapan mengenai penggunaan aplikasi KNG ini merupakan arahan langsung dari



pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dalam hal ini Dispendukcapil menurunkan arahan kepada seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Surabaya untuk mengimplementasikan aplikasi Klampid *New Generation*. Pihak birokrasi tidak hanya melakukan perintah saja, namun juga mendampingi dan mengawasi dalam penerapan aplikasi ini. Mulai dari sosialisasi, mengawasi, serta mengevaluasi sehingga dalam implementasi aplikasi KNG dapat 129 berjalan dengan baik. Selain itu Dispenduk juga menentukan SOP (Standar Operasional Procedure) dalam penggunaan serta penerapan aplikasi Klampid *New Generation*. Sesuai dengan pemaparan sebelumnya, pihak Dispenduk juga melakukan pengawasan dalam setiap proses pengurusan berkas melalui aplikasi KNG.

Dari hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa Di tingkat Kecamatan Semampir, camat Kecamatan Semampir bertanggung jawab penuh dengan Implementasi program-program serta kegiatan pemerintahan lainnya. Tentunya dalam pelaksanaannya dibantu oleh kasie dari masing-masing bidang serta seluruh staff Kecamatan Semampir. Adapun fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi. Dengan fragmentasi diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Semampir dapat dijalankan dengan lebih ringan.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi aplikasi Klampid *New Generation* adalah Sikap pegawai yang baik dan tanggap dalam melayani masyarakat, struktur birokrasi yang jelas Dimana camat Kecamatan Semampir bertanggung jawab penuh atas Implementasi dari program tersebut.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi aplikasi Klampid *New Generation* adalah tidak semua masyarakat di wilayah Kecamatan Semampir memiliki sarana prasarana untuk mengakses menu pada program Klampid *New Generation*. Sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Klampid *New Generation* belum berjalan optimal, karena ditemukan masih ada masyarakat yang ingin melakukan kepengurusan adminduk secara offline.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan terkait apa yang menjadi fokus penelitian ini, maka bisa ditarik kesimpulan yaitu implementasi aplikasi klampid *New Generation* di Kecamatan Semampir Kota Surabaya sudah terselenggara dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari aspek disposisi, aspek struktur birokrasi aspek sumber daya dan juga aspek komunikasi antar pelaksana kebijakan. Ke – empat aspek



tersebut penulis simpulkan secara rinci sebagai berikut; 1. Komunikasi, Pemerintah Kecamatan Semampir telah dengan baik menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kelurahan atau dengan internal Pemerintah Kecamatan Semampir. Dengan pemerintah Kelurahan, sudah membagi tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Di internal Kecamatan, para staff rutin memberikan laporan kepada atasan terkait dengan progress pelayanan dan juga keluhan dari masyarakat agar dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, Pemerintah Kecamatan Semampir juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar program Klampid *New Generation* dapat berjalan sesuai dengan tujuan yaitu memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan harus semakin dioptimalkan agar bisa mencapai tujuan utama dari berjalannya program ini karena masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang aplikasi KNG. 2. Sumber daya, Pemerintah Kecamatan Semampir memiliki sumber daya yang cukup mendukung. Secara sumber daya manusia, Pemerintah Kecamatan Semampir telah memiliki sumber daya aparatur yang kompeten dan mampu menjadi pendamping masyarakat mengatasi masalah yang mereka hadapi. Untuk sarana prasarana, Pemerintah Kecamatan Semampir memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Semampir. 3. Disposisi, Pemerintah kecamatan Semampir melalui aparatur birokrasinya sangat mendukung suksepsi Implementasi program Klampid *New Generation*. Mereka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standart operational prosedur pelayanan yang sudah dibuat sebelumnya dengan tindakan nyata dilapangan. 4. Struktur birokrasi, Aparatur birokrasi dari Pemerintah Kecamatan Semampir sudah melaksanakan tanggung jawab, wewenang dan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan yang mereka sandang sekarang serta pelaksanaan pelayanan berbasis online dengan aplikasi Klampid *New Generation* juga sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi aplikasi Klampid *New Generation* adalah Sikap pegawai yang baik dan tanggap dalam melayani masyarakat, struktur birokrasi yang jelas Dimana camat Kecamatan Semampir bertanggung jawab penuh atas Implementasi dari program tersebut. Adapun untuk factor penghambatnya yakni Tidak semua masyarakat di wilayah Kecamatan Semampir memiliki sarana prasarana untuk mengakses menu pada program Klampid *New Generation*. Sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Klampid *New Generation* belum berjalan optimal, karena ditemukan masih ada masyarakat yang ingin melakukan kepengurusan adminduk secara offline.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatkhur, R. D., Hanafi, I., & Hadi, M. (2013). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan



- Catatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 962–971.
- Rochmawati, C., Ulfa, M., & Muhammadiyah, U. (2021). *Population Administration Service Innovation Through Kenduren Mas Program (Kendaraan Urun Rembuk Masyarakat) Pasuruan Regency : Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Program Kenduren Mas (Kendaraan Urun Rembuk Masyarakat) Kabupaten Pasur*. 15, 1–12.
- Rudiansyah, Y. A., Argenti, G., & Febriantini, K. (2022). Kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi covid 19 di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. *Kinerja*, 18(4), 513–520. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9837>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*.
- Tachjan, H. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad.